

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan melalui kesempatan kerja dan di samping itu mengingat penduduk Indonesia kebanyakan masih dikategorikan berada dalam taraf ekonomi menengah ke bawah atau bermodal kecil, maka pemerintah dalam era pembangunan yang dicanangkan tidak luput pula menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan stabilitas nasional dengan berbagai cara, diantaranya memberikan dorongan-dorongan ke arah untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan melalui perkoperasian dengan maksud agar masyarakat ekonomi kecil dan bermodal kecil dapat memperoleh bantuan pinjaman atau tambahan modal dari koperasi yang menyalurkan kredit atau pinjaman itu.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan

dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Salah satu jenis koperasi yang dikenal di masyarakat adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan istilah KPRI. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan¹. PNS dalam memenuhi kebutuhan pribadinya dan atau keluarganya terkadang membutuhkan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang diperlukan tersebut dapat diperoleh oleh PNS dengan cara berutang, baik melalui koperasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya. KPRI sebagai koperasi yang memfokuskan kegiatannya pada kesejahteraan PNS sebagai anggotanya menanggapi keadaan tersebut dengan menawarkan kegiatan usaha simpan pinjam.

Pada dasarnya koperasi di Indonesia dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu koperasi Desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi

¹Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

dan masih banyak lagi penggolongan koperasi di Indonesia.² Sedangkan koperasi di Indonesia mempunyai pengolongan berdasarkan keanggotaanya salah satunya adalah KPRI, KPRI adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai Negeri(anggota), KPRI dapat didirikan di lingkungan departemen atau instansi.

Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.³ Berhubung sangat pentingnya wadah koperasi tersebut dalam hal membantu dan memberi arah bagi masyarakat berpenghasilan kecil untuk membantu kegiatan usahanya, maka kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh para pegawai atau karyawan di lingkungan koperasi, dimana akhirnya mereka mendirikan suatu wadah koperasi yang dapat membantu karyawan atau pegawai dalam permodalannya untuk meningkatkan usahanya, yaitu koperasi pegawai negeri Guru Bayat di Klaten yang sekaligus menghimpun para karyawan atau pegawai untuk berkoperasi. Koperasi pegawai negeri Guru Bayat bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.

²Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959

³Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2

Di dalam koperasi pegawai negeri Guru Bayat juga dikembangkan pula kemudahan dan kelonggaran dalam memberikan fasilitas perkreditan atau pemberian pinjaman kepada para pegawai atau karyawan yang telah menjadi anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Guru Bayat) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character*(watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan), dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.⁴

Perlu diketahui pula bahwa walaupun koperasi pegawai negeri Guru Bayat telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang relatif rendah serta tanpa jaminan harta kekayaan milik peminjam, akan tetapi dalam kenyataannya masih ada pula diantara para pegawai atau karyawan yang telah menjadi anggota koperasi tersebut dalam pengembalian uang pinjaman mengalami kemacetan.

Mengenai peminjaman uang pada koperasi tersebut tidak lepas dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang melaksanakannya. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakansuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antar dua orangtersebut yang dinamakan perikatan.

⁴Muhammad Djumliana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000. Hal 394

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PEGAWAI NEGERI DI KOPERASI GURU BAYAT KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian Kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten dan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Guru Bayat di Klaten.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

Adapun penelitian berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit koperasi pegawai negeri.

2) Bagi Masyarakat

Dengan membaca adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan masyarakat/pembaca sehingga masyarakat atau pembaca mengetahui mengenai bagaimana cara pelaksanaan perjanjian kredit koperasi pegawai negeri di koperasi khususnya di koperasi Guru Bayat di klaten.

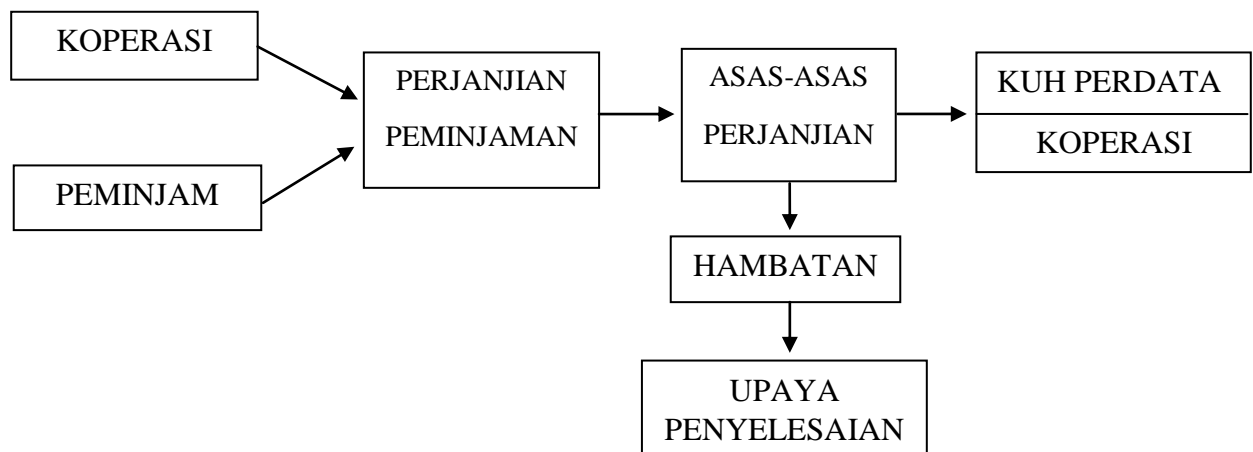
D. Kerangka Teori

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Dalam kegiatannya, koperasi memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah dengan adanya jaminan. Pinjaman tersebut berupa kredit. Kredit yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat atau berdasarkan prinsip koperasi. Dalam pelaksanaan pinjaman tersebut kadangkala terjadi hambatan yang disebabkan oleh nasabah (peminjam). Solusi dalam upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara pembinaan simpan pinjam terhadap peminjam yang bermasalah, pemberantasan tunggakan dengan melaksanakan proses surat paksa pada peminjam. Pelunasan dan pemberian keringanan bunga apabila pihak peminjam masih mampu dalam menyelesaikan pelunasan piutangnya dan

penjualan agunan, apabila pihak peminjam tidak sanggup lagi dalam menyelesaikan pelunasan piutangnya sehingga barang jaminan akan dilelang. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵ Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan mendasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk menggambarkan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.25.

F. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.⁶ Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian koperasi pegawai negeri.

G. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari kepustakaan tersebut di atas.

Penulis mengklasifikasikan menjadi dua bahan antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan Yurisprudensi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, hal.61.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan pelajaran terhadap bahan hukum primer, seperti : literatur, buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian kredit.

2. Penelitian Lapangan .

Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wilayah penelitian adalah: Klaten. Penentuan wilayah ini dengan alasan bahwa di wilayah Kabupaten Klaten tersebut terdapat banyak pengusaha ekonomi lemah yang membutuhkan bantuan dana untuk meningkatkan produktivitas dalam upaya peningkatan taraf hidupnya.
- b. Teknik sample :Teknik sample yang dipergunakan adalah *purposive sampling*, di mana pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini sesuai untuk penelitian yang bersifat kualitatif
- c. Responden
 - a) Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Guru Bayat
 - b) Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Guru Bayat
 - c) Nasabah (Anggota Koperasi Pegawai Negeri Guru Bayat)

H. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Merupakan metode untuk mengumpulkan, mencari data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan perundang-undangan, publikasi dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷ Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

I. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, tetapi merupakan sekumpulan bahan-bahan atau data yang ditemui selama penelitian berlangsung kemudian diuraikan secara terperinci. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal.82.

atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.⁸

J. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II :KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini memuat tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, azas-azas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, bentuk perjanjian, hapusnya perjanjian, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, dasar pemberian kredit, jaminan pemberian kredit, hak dan kewajiban para pihak, Pengertian perjanjian kredit, prosedur perjanjian kredit dan jenis-jenis perjanjian kredit.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN di dalam bab ini memuat tentang penyebab terjadinya kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi pegawai negeri Guru Bayat serta cara penyelesaiannya.

⁸Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia(UI-Press), hal.5.

Bab IV : PENUTUP

Di dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan sebagai hasil analisis dari uraian-uraian pada bab sebelumnya yang merupakan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN